



Judul : Pangkas Kunker, DPR Diapresiasi
Tanggal : Senin, 01 Februari 2016
Surat Kabar : Seputar Indonesia
Halaman : 4

Pangkas Kunker, DPR Diapresiasi

● AGUS RAHARJO

JAKARTA — Kebijakan memangkas kunjungan kerja dan masa reses bagi anggota DPR mendapat pujian. Kebijakan yang dikeluarkan oleh Ketua DPR yang baru, Ade Komaruddin, ini disambut baik sejumlah pihak. Sebab, dengan dipangkasnya kunker ke luar negeri dan daerah, DPR melakukan penghematan sebesar Rp 139 miliar setahun.

Politikus Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Saifullah Tamliha, mengatakan, kebijakan yang diambil oleh Ketua DPR dinilai akan mengefektifkan penghematan anggaran DPR. Namun, realisasi kebijakan ini membutuhkan pembahasan lebih lanjut. Apa yang dilakukan pimpinan DPR, kata Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR ini merupakan jawaban terhadap aspirasi masyarakat.

"Kebijakan Ketua DPR baru merupakan respons kecaman publik karena menilai anggota DPR suka jalan-jalan dan tidak ada UU yang disahkan," ujar dia di Kompleks Parlemen Senayan, Jumat (29/1).

Dengan pengurangan kunjungan kerja dan masa reses ini, diharapkan waktu pembahasan undang-undang lebih banyak. Menurut Tamliha, ini penting untuk dilakukan agar target legislasi yang sudah disepakati di sidang paripurna, beberapa waktu lalu, dapat tercapai.

Menurut dia, masa reses selama ini sekitar sebulan dinilai tidak efektif untuk pembahasan produk legislasi. Saat ini, DPR sudah menyepakati untuk memangkas masa reses menjadi 17 hari. Sebelumnya, masa reses dilakukan setiap anggota DPR selama sekitar 30 hari.

Anggota Fraksi PDIP, Masinton Pasaribu, juga menyatakan dukungannya terhadap kebijakan Ketua DPR dari Fraksi Partai Golkar tersebut. Menurut Masinton, memangkas masa reses dan kunker menjadi tanda DPR tertap merespons aspirasi dari masyarakat.

Selain masa reses dan kunker DPR, Masinton juga berharap DPR menertibkan jumlah absen kehadiran bagi para anggota.

"Kita juga harus menyoroti masalah intensitas kehadiran anggota DPR karena setahun lalu ke-hadirannya sangat kurang," kata dia.

Masinton menambahkan, kehadiran anggota DPR dalam sidang-sidang merupakan tanggung jawab anggota dewan pada daerah pemilihannya. Jadi, tingkat kehadiran di sidang parlemen harus menjadi perhatian.

Diketahui, dengan kebijakan ini, Sekretaris Jenderal DPR sudah menghitung penghematan anggaran sebesar Rp 139 miliar. Sebab, dalam setahun, DPR memiliki anggaran kunker sekitar Rp 360 miliar.

Sebelumnya, Ade Komaruddin mengatakan, salah satu cara meningkatkan produktivitas adalah dengan membatasi kunjungan kerja ke luar negeri. Selain untuk meningkatkan produktivitas, pembatasan itu juga untuk efisiensi anggaran.

"Salah satu caranya adalah kunker ke luar negeri dikurangi total. Pertama, untuk efisiensi anggaran dan kedua, tentu soal waktu supaya kita fokus memproduksi UU dengan baik," ucapnya.

Selama ini, kunjungan kerja DPR ke luar negeri memang selalu menjadi sorotan. DPR beralasan menjalankan fungsi diplomasi.

■ ed: muhammad hafid